

**DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM KERANGKA  
PENDIDIKAN NASIONAL  
(TELAAH PEMIKIRAN H.A.R. TILAAH)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)**

**Disusun oleh :**

**MUKLASIN  
NIM: 09470151**

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

**DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM KERANGKA  
PENDIDIKAN NASIONAL  
(TELAAH PEMIKIRAN H.A.R. TILAAH)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)**

**Disusun oleh :**

**MUKLASIN  
NIM: 09470151**

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muklasin

NIM : 09470151

Jurusan : Kependidikan Islam (KI)

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiat karya orang lain kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 02 Januari 2014

Yang menyatakan,

  
Muklasin  
09470151



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muklasin  
Lamp : 3 eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muklasin  
NIM : 09470151  
Judul : Demokrasi Pendidikan dalam Kerangka Pendidikan Nasional  
(Telaah Pemikiran H.A.R. Tilaar)

sudah dapat diajukan kepada Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 02 Januari 2014

Pembimbing,

Prof. Dr. Abdurrahman Assegaf M.Ag  
NIP. 19640312 199503 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muklasin

Lamp : 3 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muklasin

NIM : 09470151

Judul : Demokrasi Pendidikan dalam Kerangka Pendidikan Nasional  
(Telaah Pemikiran H.A.R. Tilaar)

yang sudah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 29 Januari 2014 sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 17 Februari 2014

Konsultan,

Prof. Dr. Abdurrahman Assegaf M.Ag

NIP. 19640312 199503 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor: UIN.2/DT/PP.01.1/ 334/2014

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul:

**DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM KERANGKA PENDIDIKAN  
NASIONAL (TELAAH PEMIKIRAN H.A.R. TILAAAR)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUKLASIN

NIM : 09470151

Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu, 29 Januari 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang

Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf M.A  
NIP. 19640312 199503 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Arifi, M.Ag  
NIP. 19661121 199203 1 002

Penguji II

Zainal Arifin, M.S.I  
NIP. 19800324 200912 1 002

Yogyakarta, 19 FEB 2014

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si  
NIP. 19590525 198503 1 005

## MOTTO

*Demokrasi itu harga mati.*

*Demokrasi itu kebenaran sejati.*

*Demokrasi itu la raiba fih, taka da keraguan padanya.\**



---

\* Emha Ainun Najib, *Demokrasi la Raiba Fih*, (Jakarta, Kompas: 2009)

**PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK  
ALMAMATER TERCINTA  
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menjadi revolusioner sejati dikehidupan dunia ini.

Skripsi yang berjudul Demokrasi Pendidikan dalam Kerangka Pendidikan Nasional ini tidak akan mempunyai arti apa-apa dan bahkan akan tersendat selesainya ketika tidak ada bantuan baik materi maupun non materi. Penulis menganggap tidak berlebihan jika rasa terimakasih ini penulis haturkan kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Nur Rohmah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Misbah Ulmunir, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M.A selaku Pembimbing Skripsi, yang telah mencurahkan kesabarannya dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Henry Alex Roudlof Tilaar M.Sc. Ed. yang telah bersedia memberi masukan, semangat serta waktu diskusi untuk penulis semoga dapat ditindak lanjuti.
6. Bapak Edi Yusuf Nur Samsu Santosa selaku Penasehat Akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Sarludi dan Ibu Martini tercinta dan juga kedua adik tersayang Uswatun Khasanah dan Khusnul Muntamah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya serta telah memberi semangat dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat di PMII Rayon Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Sedulur di Pon-Pes Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dan A.P.I. Bahrul ‘Ulum, Lampung.
11. Saudara-saudara di KORDISKA (Korps Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga) Yogyakarta yang tak henti-hentinya menopang semangat buat

penulis agar tetap *survive*. Bapak Muh. Qowim M.Ag selaku Pembina UKM KORDISKA, ada teman-teman Mahfudin, Muh. Mudrik, Emil, Dwi Nur Wahyuni, Muh. Abdul Rouf, Desitasari, Muh. Ikhsan Kholid dan lain-lain yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

12. Semua teman-teman diskusi *Warung Kopi*: Kang Mahfud, Imam Attaji, Umi Zainaf, Adik Arifin Surender, Pakde Muhammad Lukman Hajir, Kang mas Arifin Simangkulangit, Mas Hasan Burhani, Fuad Hasan yang tidak mengurangi rasa terimakasih penulis karena telah banyak sekali berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima menjadi amal shaleh di sisi Allah swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna sebagaimana penulis haparkan dapat menyumbang khazanah keilmuan khususnya tentang pendidikan. Penulis sangat sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi penulis sangat yakin sekali jika ada niat baik maka usaha sekecil apapun itu akan menjadi bermanfaat. *Amiin*

Yogyakarta, 02 Januari 2014

Penulis,

**Muklasin**  
NIM. 09470151

## ABSTRAK

**Muklasin.** *Demokrasi pendidikan dalam Kerangka Pendidikan Nasional (Telaah Pemikiran H.A.R. Tilaar)*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Latar belakang penelitian ini adalah kesadaran pendidikan nasional yang kurang memaknai Pancasila dan undang-undang dasar 1945. H.A.R. Tilaar melihat pendidikan nasional ada beberapa masalah, yaitu: (1) Pendidikan penuh kebimbangan, (2) sistem pendidikan elitis (3) Proses domestifikasi (4) Proses pembodohan (5) budaya korporasi, yang didalamnya terdapat banyak kebijakan yang kurang memihak peserta didik.

Penelitian ini merupakan penelitian *Liberary Reseach* dengan objek penelitiannya adalah kepustakaan, baik buku, artikel, surat kabar dan lain-lain. Proses pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumenter yaitu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selain dokumenter penulis juga menggunakan teknik wawancara yang tujuannya adalah mempertegas dari pendapat-pendapat yang ada di dalam buku. Metode analisis data penulis menggunakan cara heuristik, kritik dan selanjutnya interpretasi guna menarik suatu pemikiran besarnya.

Hasil penelitian ini adalah: demokrasi pendidikan menuntut kesetaraan hak setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, akan tetapi dengan mempertimbangkan potensi yang dibawa peserta didik sejak lahir. Selanjutnya demokrasi pendidikan harus dipahami segala kebijakan tentang pendidikan harus bertumpu pada kepentingan rakyat. Dalam demokrasi pendidikan menurut H.A.R. Tilaar ada empat prinsip: (1) Pendidikan adalah hak setiap warga Negara, (2) pendidikan terbuka, (3) pendidikan untuk seluruh rakyat, dan (4) cerdas dan bermoral merupakan tujuan pendidikan Indonesia.

Demokrasi pendidikan H.A.R. Tilaar beserta prinsipnya selanjutnya mempunyai titik temu dengan pendidikan Islam yaitu dalam Q.S. An-Nahl: 78 bahwa manusia dilahirkan dimuka bumi ini dibekali dengan penglihatan, pendengaran serta hati agar manusia bersyukur. Makna bersyukur dalam hal ini termasuk juga pendidikan, dan proses pendidikan tersebut akan sangat sulit direalisasikan ketika pendidikan nasional sendiri merupakan pendidikan yang tidak demokratis. Selanjutnya dari demokrasi pendidikan diharapkan pendidikan Islam mampu mengaktualisasikan hadis bahwasannya setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu.

Kontribusi penelitian ini adalah: (1) demokrasi dalam pendidikan menuntut *egalitarianism*, sebagai wahana tercapainya masyarakat demokratis. (2) evaluasi pendidikan hendaknya menguntungkan peserta didik, bukan keuntungan pemangku kebijakan. (3) tujuan pendidikan adalah mencerdaskan bangsa yang secara umum ada dua fungsi: politik dan kebudayaan. (4) pendidikan islam harus mampu mengembangkan term *khalifah fil ard* juga term '*abdullah*, yaitu manusia sebagai pemimpin di muka bumi dan manusia juga diciptakan sebagai penyembah Allah swt.

Kata kunci: Demokrasi Pendidikan, pendidikan nasional, H.A.R. Tilaar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT PERSETUJUAN KONSULTAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Landasan Teoritik .....	19
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	34
BAB II : BIOGRAFI H.A.R. TILAAAR	
A. Keluarga dan Pendidikan H.A.R. Tilaar ..	35
B. Karir H.A.R. Tilaar .....	39
C. Pemikiran Umum H.A.R. Tilaar Tentang Pendidikan Nasional	42
D. Karya H.A.R. Tilaar .....	44
BAB III : DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM KERANGKA PENDIDIKAN NASIONAL PEMIKIRAN H.A.R. TILAAAR	
A. Demokrasi Pendidikan H.A.R. Tilaar ..	51
B. Prinsip Demokrasi Pendidikan H.A.R. Tilaar .....	58
1. Pengakuan hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan	59
2. Pendidikan terbuka.....	60

3. Pendidikan seluruh rakyat .....	62
4. Manusia cerdas dan bermoral adalah tujuan pendidikan ...	65
C. Relevansi Demokrasi Pendidikan H.A.R. Tilaar dalam Pendidikan Islam.....	70
D. Kekurangan dan Kelebihan H.A.R. Tilaar tentang Demokrasi Pendidikan dalam Pendidikan Nasional .....	82

#### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-saran .....	86
C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّةً	ditulis	‘iddah

**C. Tā' marbutah di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah



(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

#### D. Vokal Pendek

ضَرَبَ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	ḍāraba
فَهِمَ	Kasrah	ditulis	i
		ditulis	fahima
كُتِبَ	Ḍāmmah	ditulis	u
		ditulis	kutiba

#### E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā
		Ditulis	yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī
		Ditulis	Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūḍ

## F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yāmati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

## G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<b>Ditulis</b>	Al-Qur'ān
القياس	<b>Ditulis</b>	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<b>Ditulis</b>	Asy-Syams
السماء	<b>Ditulis</b>	As-Samā'

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	<b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	Zawi al-Furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Surat Penunjukan Pembimbing
Lampiran II	: Bukti ACC Proposal
Lampiran III	: Bukti Seminar Proposal
Lampiran IV	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran V	: Bukti ACC Skripsi
Lampiran VI	: Bukti Mengikuti Munaqosyah Orang lain
Lampiran VII	: Foto Copy Sertifikat PPL-1
Lampiran VIII	: Foto Copy Sertifikat PPL-2
Lampiran IX	: Foto Copy Sertifikat Toefl
Lampiran X	: Foto Copy Sertifikat Toafl
Lampiran XI	: Foto Copy Sertifikat IT
Lampiran XII	: Foto Copy Sertifikat Sospem
Lampiran XIII	: User Education Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
Lampiran XIV	: Wawancara Prof. Dr. H.A.R. Tilaar M.Sc, Ed
Lampiran XV	: Foto Copy Sertifikat Seminar Nasional UNY - Prof. Tilaar
Lampiran XVI	: Foto Copy Sertifikat PUSPA
Lampiran XVII	: Foto Copy Sertifikat Sekolah Gender
Lampiran XVIII	: Komentar Skripsi oleh Prof. Tilaar
Lampiran XIX	: Foto Bersama Prof. Tilaar
Lampiran XX	: Foto Copy Ijazah Terahir
Lampiran XXI	: Curriculum Vitae

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan komponen kehidupan manusia yang paling penting, aktifitas ini akan terus berlangsung sejak manusia pertama ada di dunia hingga berakhirnya kehidupan dimuka bumi ini.<sup>1</sup> Pembaharuan-pembaharuan pendidikan harus selalu ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pemangku kebijakan, pembaharuan harus mampu mengaktualisasikan tujuannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Kesadaran ini memberi kontribusi besar kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang menyatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat,<sup>3</sup> yaitu membentuk masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman, pluralitas dan kesadaran multikultural. Kemudian salah satu prinsip dari pendidikan demokrasi adalah menciptakan manusia yang cerdas dan bermoral.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan pernyataan di atas, demokrasi pendidikan merupakan tema yang penulis anggap penting untuk dibahas mengingat kompleksnya permasalahan yang hinggap pada tubuh pendidikan nasional. Penulis awali

---

<sup>1</sup> Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2011), hal. 25.

<sup>2</sup> Suryanto & Djihad Hisym, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hal. 17.

<sup>3</sup> H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasionaln Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006). hal. 120.

<sup>4</sup> H.A.R Tilaar, *Kalaedoskop Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2012), hal. 1110.

dari masa pra-orde baru, eksklusif dan tidak menerima unsur budaya apapun menjadi corak tersendiri dalam dunia pendidikan nasional. Kemudian dari pendidikan yang ada diarahkan sebagai alat terciptanya para militerisme yang militant yang dapat membela tanah air Indonesia. Sehingga yang terjadi dari kondisi ini pendidikan merupakan produksi manusia yang kerdil dalam pemikirannya, karena tidak adanya proses pengembangan potensi dan kebebasan berfikir.<sup>5</sup>

Kemudian beralih pada masa orde baru, yang menjadi jargon utama pada masa itu adalah pembangunan (peningkatan ekonomi). Pembangunan disini sebenarnya dinilai maju bagi kehidupan rakyat Indonesia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pemaknaan demokrasi yang justru diseragamkan.<sup>6</sup> Istilah “*student centered*” seperti yang diangkat oleh Carl Rogers<sup>7</sup> belum ada dan bahkan guru yang mendominasi “*teacher centered*”. Makna pendidikan menjadikan manusia lebih manusiawi, bermoral, dan menghargai perbedaan tidak muncul sama sekali.<sup>8</sup> Senada dengan yang dikatakan Paul Goodman yang dikutip oleh Ahmad Baedowi tentang pengembangan potensi siswa seakan hanya difasilitasi oleh kurikulum yang kaku dan seragam.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hal.2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.3.

<sup>7</sup> H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 74.

<sup>8</sup> Ahmad Baedowi, “The Power Of Learning Experience”, *Media Indonesia*, Senin, 8 April 2013, hal.27.

<sup>9</sup> Kresna Aditya, “Pemain Inti Dunia Pendidikan”, *Media Indonesia*, Senin 8 April 2013. hal.27.

Kemudian beranjak pada masa reformasi yang sekarang ini, pendidikan tidak luput dari masalah-masalah yang ada, akan tetapi dengan kemasan yang berbeda. Sebagai contoh nyata di Indonesia jika mengacu pada data Kemendiknas 2011 tentang angka partisipasi siswa (APS) bahwa angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP baru 70%, dan APK untuk SMU baru berkisar sekitar 60%. Kemudian jika mengacu pada Kemendiknas 2012 dari 3,7 juta lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya berkisar 2,2 juta. Itu artinya ada sekitar setengah juta lulusan SMP terlempar di jalan. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah sekolah rusak di Indonesia mencapai lebih 140 ribu bangunan.<sup>10</sup>

Dalam UUD 1945 sudah menjadi kesepakatan bahwa pendidikan merupakan suatu hak asasi manusia, dalam arti sudah menjadi hak universal yang diakui oleh umat manusia Indonesia.<sup>11</sup> Akan tetapi jika dilihat dari kenyataannya, lembaga pendidikan yang “bermutu” seakan hanya mampu diakses oleh orang-orang yang “berduit”, pendidikan tinggi berebut menjadi *Word Class University* yang pada hakikatnya menjauhkan pendidikan dari jangkauan anak-anak miskin.<sup>12</sup> Dengan kata lain pendidikan menciptakan keadaan masyarakat yang kaya semakin pintar, dan yang miskin semakin terpuruk dalam kebodohan yang mengakar dan mengurat dalam kehidupan.<sup>13</sup> Banyak anak bangsa putus sekolah karena kekurangan biaya seakan menjadi

---

<sup>10</sup> Agus Wibowo, “Kemana Arah Pendidikan Kita?”, *Media Indonesia*, Senin, 17 Juni 2013, hal. 20.

<sup>11</sup> H.A.R Tilaar, *Kalaedoskop*...., hal. 1110.

<sup>12</sup> H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.14.

<sup>13</sup> Mohammad Saroni, *Pendidikan Untuk Orang Miskin*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2013), hal. 10.

kodrat dari manusia yang hidup di negara subur seperti Indonesia. Hal ini tentunya sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

*Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.<sup>14</sup>*

Anggaran pendidikan 20% dari APBD dan APBN menuntut prinsip demokrasi benar dijalankan, agar tidak tersumbat di tengah jalan. Kemudian prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional secara jelas diuraikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 bahwa: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.<sup>15</sup>

Dari pernyataan Undang-undang di atas, sudah jelas bahwa pendidikan nasional tidak menghendaki adanya pemaksaan atas hak asasi manusia dan merampas keberagaman yang ada. Keberagaman merupakan aspek yang perlu dikembangkan potensinya bukan untuk dibatasi serta diseragamkan, karena Indonesia merupakan Negara kaya akan budaya.

Masalah yang sampai sekarang dipandang penting adalah kurangnya desentralisasi pendidikan, dimana kita tahu bahwa sistem pendidikan nasional

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Bab XIII Ayat 1.

<sup>15</sup> Khoirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.47.



terlalu disentralkan,<sup>16</sup> sehingga corak yang muncul adalah pemerintah kurang percaya kepada guru yang hampir setiap hari berdampingan dengan siswanya, sedangkan pemerintah mengambil alih semua untuk diseragamkan dalam ujian nasional. Standar proses<sup>17</sup> dalam hal ini kurang mendapatkan tempat, melainkan standar nilai yang tidak jarang mendorong guru untuk melakukan kecurangan menjadi dominan.<sup>18</sup> Kecurangan di sini bukan semata-mata karena memang ingin melakukan, akan tetapi ada sisi lain yang mendorongnya. Salah satunya adalah nilai tinggi berhak mendapatkan Universitas ternama sedangkan disisi lain peserta didik didaerahnya minim guru serta fasilitas pendidikan.

Selanjutnya jika pendidikan dilihat secara lebih luas, paradigma pendidikan nasional dinilai masih amburadul dalam visi misinya. Pendidikan dinilai hanya sebagai instrumen kekuasaan politik<sup>19</sup> dan disubordinasikan dalam kekuasaan politik sehingga yang terjadi adalah manusia yang ikut-ikutan, bagaikan robot yang dikendalikan oleh *remote control*. Pendidikan dikatakan masuk dalam ranah politik dengan bukti bahwa realitas kurikulum dinegara ini sudah ada sejak tahun 1968 kemudian berlanjut 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006,<sup>20</sup> dan sekarang menjadi kurikulum 2013. Perubahan

---

<sup>16</sup> H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 6.

<sup>17</sup> Ahmad Baedowi, "Rumah Guru Indonesia", *Media Indonesia*, Senin 29 April 2013, hal. 14.

<sup>18</sup> Wijaya Kusumah, "Saatnya Guru Bersuara Lantang", *Media Indonesia*, Senin 29 April 2013, hal. 14.

<sup>19</sup> Benny Susetyo, "Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Kebijakan Pendidikan Gagal?", *Media Indonesia*, Jumat, 22 Maret 2013, hal. 10.

<sup>20</sup> Moh. Yamin, *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hal. 17.

kurikulum dinilai sangat penting sehingga setiap perubahan menteri, berubahlah kurikulum pendidikan Indonesia.

Dalam buku *Kalaedoskop Pendidikan Nasional* Prof. Tilaar memaparkan beberapa contoh negara yang mempunyai visi pendidikan yaitu Amerika dan Malaysia. Pra tahun 2000 tepatnya sekitar 1980 Amerika merasa mulai tersaingi oleh Uni Soviet dan negara-negara industri seperti Jepang ataupun Korea Selatan. Akan tetapi dengan keadaan seperti itu Amerika punya tekad yang kuat kemudian diimplementasikan dalam visi pendidikan yang dikenal dengan *Nasional Goal 2000: Educate America Act*.

Selanjutnya Negara Malaysia, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Amerika, pada sekitar 1990 era Mahathir Mohamad mereka mempunyai visi pemerintahan yang jelas sehingga diprediksi pada tahun 2020 Malaysia merupakan masyarakat industrial dan makmur. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dari dua negara percontohan tersebut, pendidikan sedikit lebih maju dibandingkan negara Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam beberapa diskusi Prof. Tilaar sering mempermasalahkan kebijakan nasional yang kurang memihak pada rakyat kecil khususnya masalah pendidikan, karena diyakini bahwa Indonesia merupakan negara berkembang masih jauh dari tataran negara maju. Negara berkembang merupakan negara yang angka kemiskinannya masih tinggi dan jika itu dipaksakan menjadi negara maju maka secara otomatis kebijakannya pun akan

---

<sup>21</sup> H.A.R. Tilaar, *Kalaedoskop Pendidikan Nasional...*, hal. 93.

menindas bagi rakyat miskin. Dalam *Judicial review* yang digelar di Mahkamah konstitusi H.A.R. Tilaar dengan jelas mengatakan bahwa:

*“...mengangkat fakta bahwa Indonesia masih merupakan Negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Karena itu, perlu ada kesempatan yang seluas-luasnya pada semua warga Negara untuk mengembangkan bakatnya. Apalagi, Pendidikan Tinggi merupakan investasi karena mempunyai “rate of returns” yang cukup besar sebagai modal kultural, dan modal sosial ekonomi.”*<sup>22</sup>

Selanjutnya Prof. Tilaar dalam kesempatan yang sama (Mei 2013)

Prof. Tilaar secara tegas menyatakan pengelolaan pendidikan tinggi dalam UU Dikti berimplikasi tersingkirnya mahasiswa dari keluarga miskin, sehingga UU ini tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945.<sup>23</sup> Kemudian dalam kaitannya dengan undang-undang BHP di perguruan tinggi Prof. Tilaar meyakini itu merupakan salah satu bentuk dari pendidikan yang kurang bernuansa demokratis, karena tidak memberi keleluasaan pada perguruan tinggi untuk berkembang. Walaupun pada dasarnya undang-undang ini sudah dihapus, akan tetapi diramalkan sebentar lagi akan dibahas kembali. Perguruan tinggi merupakan tempat studi yang membutuhkan kebebasan, otonomi yang luas dan bukan malah dikekang oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan guna sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam pernyataannya, “pendidikan tinggi harus mempunyai otonomi, jadi bukan di

---

<sup>22</sup> Admin, *Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. : UU Dikti Singkirkan Masyarakat Miskin*, <http://progresivenews.com/2013/05/30/prof-dr-h-a-r-tilaar-m-sc-ed-uu-dikti-singkirkan-masyarakat-miskin/>. Di unduh: Rabu, 17 Juli 2013 Pukul: 09:29

<sup>23</sup> Lihat: <http://progresivenews.com/2013/05/30/prof-dr-h-a-r-tilaar-m-sc-ed-uu-dikti-singkirkan-masyarakat-miskin/>

bawah birokrasi karena pendidikan tinggi itu merupakan badan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan”.<sup>24</sup>

Selanjutnya beralih pada evaluasi pendidikan Indonesia, Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu momok yang mematikan kreatifitas siswa dan menakutkan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh berita99.com prof. Tilaar mengatakan bahwa:

*Walaupun UN dilancarkan, meskipun ada perbaikan 60 persen dari hasil UN dan 40 persen dari ujian sekolah, UN sangat mematikan kreativitas anak-anak kita, seperti anak SD, SMP, dan SMA yang diajarkan oleh guru hanya dihafalkan saja. Jadi nilai-nilai kreativitasnya yang ditaburkan kepada setiap murid tidak muncul.*<sup>25</sup>

Pendidikan (UN) seakan sebagai misteri yang pasti akan menimpa seorang peserta didik. Menurut H.A.R. Tilaar ujian nasional itu bisa saja perlu diadakan mengingat luasnya wilayah Indonesia, akan tetapi fungsi dan tujuannya bukanlah sebagai alat untuk menghakimi siswa. Ujian nasional seharusnya sebagai wahana pemerintah untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensinya, bukan sebagai alat menstarakan siswa satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan wahana pemerintah untuk membantu siswa adalah ujian nasional digunakan sebagai alat untuk mengetahui kondisi pembelajaran di wilayah satu dengan yang lain, sebagai contoh yang beliau sampaikan adalah:

*“...misalnya matematika di kutai katakan, itu lebih rendah dari Jakarta, hasil ujiannya. Ini artinya apa, artinya pemerintah harus membuat sesuatu untuk memperbaiki pendidikan matematika di kutai,*

---

<sup>24</sup> Wawancara, Selasa, 25 Juni 2013 (Gedung Safe'i Lantai 6 Universitas Negeri Jakarta), 12:00.

<sup>25</sup> Inggar Saputra, *Pengamat: UN Matikan Kreativitas Siswa*, <http://www.berita99.com/berita/7482/pengamat-un-matikan-kreativitas-siswa>, diunduh 17 Juli 2013, pukul, 10.05

*apa gurunya tidak ada, buku pelajaran tidak ada, jadi itu untuk merumuskan sesuatu kebijakan pendidikan pemerintah. Sehingga ini akan menguntungkan peserta didik. Nah itulah saya bilang tujuan dari pada Ujian nasional”.*<sup>26</sup>

Dari pernyataan di atas, yang kita tahu selama ini fungsi ujian nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan nasional supaya bisa bersaing dengan Negara lain, dan itu merupakan kepentingan birokrasi bukan membantu peserta didik.<sup>27</sup>

Dari banyak masalah yang hinggap dalam tubuh pendidikan Indonesia, H.A.R. Tilaar menyebutkan 5 perkara yang dianggap penting, yaitu:

1. Pendidikan penuh kebohongan

Amanat UUD 1945 yaitu pendidikan untuk mencerdaskan rakyat kiranya seiring bejalannya waktu semakin luntur, pendidikan yang seharusnya merupakan hak dari setiap warga Negara kini seakan menjadi sebagian warga saja yang mampu membelinya, dan itu jelas merupakan kebohongan besar<sup>28</sup> dalam tubuh pendidikan.

2. Sistem pendidikan yang elitis

Pendidikan yang elitis merupakan warisan dari pendidikan yang ada pada masa kolonial.<sup>29</sup> Pendidikan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berduit, sebagai buktinya adalah adanya SBI/RSBI sebagaimana yang ahir tahun 2013 telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi bukan berarti praktek seperti ini

---

<sup>26</sup> Wawancara., selasa, 25 Juni 2013 (Gedung Safe’i Lantai 6 Universitas Negeri Jakarta), 12:00.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> H.A.R. Tilaar, *Kalaedoskop...*, hal 1108

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 1109

hilang, melainkan hanya berubah warna dengan nama yang berbeda.

### 3. Proses domestifikasi

Proses domestifikasi ini berlaku dengan terstruktur ketika zaman Orde Baru, yang menggunakan segala kebijakan termasuk pendidikan sebagai alat politik. Proses domestifikasi ini pada saat ini berubah istilah menjadi proses mematikan inisiatif dan berfikir kreatif yang dinilai sebagai wahana penjinakan agar warga Negara menjadi patuh terhadap sistem yang ada.<sup>30</sup>

### 4. Proses pembodohan

Pembodohan atau *Stupidifikasi* masih saja berlaku baik sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Proses ini merupakan proses yang tidak demokratis karena dinilai mematikan kreatifitas siswa itu sendiri. Jika kreatifitas siswa tidak muncul maka Negara semakin tertinggal dengan Negara-negara maju yang modern.<sup>31</sup>

### 5. Budaya korporasi

Pendidikan Indonesia saat ini seakan menjadi *fast-food* yang cepat laku tanpa gizi.<sup>32</sup> Pendidikan saat ini berhasil membuat para siswanya menjadi pintar akan tetapi tak mempunyai arti apa-apa dalam masyarakat atau kosong akan nilai.

Demokrasi pendidikan merupakan sebuah konsep pendidikan yang menolak segala permasalahan di atas, sebaliknya demokrasi pendidikan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 1115

merupakan paradigma pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia menuntut pendidikan yang bersifat terbuka, pendidikan yang inklusi, pendidikan yang tidak memilah-milah masalah kesenjangan yang ada pada siswa, baik dari segi ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Sebagai dasar dari demokrasi pendidikan adalah undang-undang dasar sendiri yang merupakan amanat kemerdekaan republik Indonesia dengan kesepakatan rakyat Indonesia.

Selanjutnya demokrasi pendidikan merupakan solusi dan sebagai pengaktualisasi diri dari kiblat pendidikan Indonesia yaitu Pancasila, dimana pendidikan yang sekarang ini harus secepatnya berfikir ulang tentang konsep yang sudah ada untuk diperbaiki. Sudah saatnya pendidikan Indonesia sadar akan kebutuhan masyarakat, disamping pendidikan menjadi tumpuan dan *dinamisator* masyarakat, pendidikan juga sebagai tiang penyanggah dari kesinambungan masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

Dari banyak uraian masalah pendidikan di atas, judul “*Demokrasi Pendidikan Dalam Kerangka Pendidikan Nasional (Telaah Pemikiran H.A.R Tilaar)*” dipandang penting dan layak untuk dibahas. H.A.R Tilaar merupakan tokoh pemerhati pendidikan yang sekaligus tokoh yang terjun langsung dalam proses pendidikan untuk mengetahui kondisi lapangan. Beliau merupakan salah satu dari banyak pemikir *critical* yang sampai pada umur 80 tahun masih produktif.

---

<sup>33</sup> H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional; Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 80.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari masalah di atas, maka yang akan menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Demokrasi Pendidikan menurut H.A.R Tilaar?
2. Apa prinsip yang dibangun H.A.R Tilaar dalam Demokrasi Pendidikan nasional?
3. Bagaimana relevansi demokrasi pendidikan H.A.R Tilaar dalam pendidikan Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pemikiran H.A.R Tilaar tentang demokrasi pendidikan di Indonesia
2. Mengetahui pemikiran H.A.R Tilaar tentang prinsip demokrasi pendidikan
3. Mengetahui implementasi demokrasi pendidikan H.A.R. Tilaar dalam pendidikan Islam

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan kedalaman penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang pentingnya konsep demokrasi pendidikan
2. Menambah pengetahuan bagi guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional



3. Menambah wawasan tentang konsep demokrasi pendidikan H.A.R Tilaar dan implementasi dalam dunia pendidikan Islam

#### E. Telaah Pustaka

Masalah demokrasi pendidikan banyak mengundang perhatian para tokoh pendidikan nasional, para pemerhati pendidikan, mahasiswa, guru dan juga kalangan lain, karena didalamnya terdapat pembahasan yang dapat dilihat dalam sudut pandang politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

1. Buku "*Paradigma Pendidikan yang Membebaskan*"<sup>34</sup> mengupas pendidikan yang seharusnya membebaskan peserta didik dari segala macam belenggu dan bentuk penindasan dalam bentuk apapun, manusia yang tertindas dan yang menindas diharapkan berdiri bersama dalam momen mencerdaskan bangsa bukan karena manipulasi politik. Selanjutnya dalam buku ini yang menjadi pisau analisisnya adalah pendidikan yang membebaskan ala Freire, penulis mengungkapkan bahwa pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang demokratis.<sup>35</sup> pendidikan yang membebaskan ini termasuk didalamnya ada humanisasi, pendidikan yang dialogis, siswa bukan sebagai gelas kosong, pendidikan kritis dan lain-lain.
2. Kemudian buku "*Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi*"<sup>36</sup> membahas tentang konsep dasar pendidikan pluralis dan demokratis. Pendidikan yang pluralis disini berangkat dari kesadaran

---

<sup>34</sup> Ahmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan Yang Membebaskan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011).

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>36</sup> Syamsul Arifin, Ahmad Barizi, (Malang: UMM Universitas Muhammadiyah Malang 2001).

bahwa manusia semakin lama semakin tidak terbedung hubungannya dengan manusia lain, dalam dunia globalisasi sangat memaksa manusia untuk menyadari tentang masyarakat yang pluralis. Selanjutnya yaitu pendidikan demokratis, yang mengutarakan konsep dasarnya yaitu memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan situasi sosial.<sup>37</sup> Pendidikan yang menginginkan bersih dari campur tangan politik, sentralisasi pendidikan, dominasi guru dan hanya memandang tujuannya yaitu pembebasan.

3. Dalam buku "*Pendidikan Untuk Orang Miskin*"<sup>38</sup> membahas tentang nilai-nilai demokrasi dalam proses pendidikan. Walaupun didalamnya tidak ada bahasan khusus demokrasi akan tetapi inti atau makna didalamnya merupakan nilai-nilai yang demokratis. Selanjutnya buku tersebut membahas tentang konsep pendidikan untuk semua, yaitu konsep pendidikan yang memang sesuai dengan amanat UUD RI yang mengatakan pembiayaan pendidikan ditanggung pemerintah. Kemudian pendidikan dinilai sebagai salah satu jalan menuju proses perubahan bangsa untuk bangkit dari kemiskinan. Dalam buku ini pendidikan diartikan sebagai alat transfer ilmu pengetahuan serta keterampilan kepada peserta didik. Dalam proses pendidikan, orang-orang yang berkemampuan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 91.

<sup>38</sup> Muhammad Saroni, (Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2013).

lebih memberikan pencerahan dan pendampingan bagi orang-orang yang tingkat kemampuannya kurang.<sup>39</sup>

4. Dalam buku "*Pendidikan Karakter (Membangun Delapan Karakter Emas Menuju Indonesia Bermartabat)*"<sup>40</sup> menjelaskan tentang konsep pendidikan karakter yang seakan menjadi "agama baru" dalam dunia pendidikan. Nilai karakter yang memang dikembangkan dalam buku ada delapan yang salah satunya adalah demokrasi. Makna demokrasi sendiri dalam buku ini mencakup ke semua lini kehidupan, baik dalam pendidikan, sosial maupun budaya.
5. Dalam buku "*Paradigma Pendidikan Demokrasi (Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan)*"<sup>41</sup> mengupas tentang konsep pendidikan demokrasi yang yang didalamnya pelibatan siswa dalam kelas menjadi lebih banyak, dan guru menjadi fasilitator. Kemudian dalam buku ini peran masyarakat dalam menunjang pendidikan di dalam sekolah diprioritaskan. Masyarakat merupakan *stakeholder* lembaga pendidikan yang menyebabkan dalam penyusunan kurikulum pun masyarakat diikut sertakan.
6. Disamping buku-buku di atas, skripsi pendidikan yang ditulis oleh Muntadhiro yang berjudul "*Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Tentang*

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 241.

<sup>40</sup> Bagus Mustakim, *Pendidikan Karakter (Membangun Delapan Karakter Emas Menuju Indonesia Bermartabat)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011).

<sup>41</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2003).

*Demokrasi dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam di Pesantren*".<sup>42</sup>

Berangkat dari tokoh Gus Dur yang memang notabenenya adalah ke-Islaman *kosmopolit*<sup>43</sup> yang melampaui Islam tradisional yang membesarkannya, skripsi ini berusaha untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep demokrasi dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, kemudian mengerucut pada pesantren.

7. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifullah yang berjudul *"Pemikiran John Dewey Tentang Demokrasi Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam"*.<sup>44</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang konsep demokrasi menurut John Dewey dan relevansinya kepada pendidikan Islam, dalam hal ini yang dimaksud dengan konsep demokrasi pada pendidikan Islam adalah adanya prinsip kebebasan dan keadilan, prinsip musyawarah, kemaslahatan, *ta'awun*, *taghyir* atau perubahan, anak didik, guru, metode, kurikulum dan pandangan terhadap tujuan pendidikan Islam.
8. Skripsi yang ditulis oleh Ali Sahlan dengan judul *"Demokrasi Dalam Perspektif Islam (Telaah Kritis Terhadap Sistem Pendidikan Islam)"*.<sup>45</sup> Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang hakikat pendidikan

---

<sup>42</sup> Muntadhiro, *Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam di Pesantren, Skripsi* (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

<sup>43</sup> Tumbuh-tumbuhan yang ada dimana-mana, warga dunia; orang yang menganggap dunia seluruhnya sebagai tanah airnya, Lihat: *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal. 268.

<sup>44</sup> Ahmad Syaifullah, *Pemikiran John Dewey Tentang Demokrasi Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam, Skripsi* (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

<sup>45</sup> Ali Sahlan, *"Demokrasi Dalam Perspektif Islam (Telaah Kritis Terhadap Sistem Pendidikan Islam), Skripsi* (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

Islam, demokrasi pendidikan Islam, Islam dan demokrasi. Pada kesimpulannya penulis mengemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana sumber daya terpenting dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan Islam sangat potensial untuk menjadi pendidikan yang ideal karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, keterbukaan, egalitarian, kritis dan dialogis. Akan tetapi sangat disayangkan nilai-nilai tersebut kurang termanifestasi di lapangan. Seperti krisis secara metodologi, secara konseptual dan sistem pendidikan yang bersifat sentralistik-birokratis.

9. Skripsi Sunartono yang berjudul "*Penerapan Demokratisasi Pendidikan (Studi Kasus di SDN Sokowaten Baru Yogyakarta)*".<sup>46</sup> Skripsi ini berusaha mengeksplor beberapa konsep demokratisasi dalam pendidikan khususnya demokratisasi dalam menentukan kebijakan pendidikan. Selanjutnya penulis berusaha menyuguhkan penerapan demokratisasi pendidikan dalam menentukan kebijakan pendidikan di SDN Sokowaten Baru Yogyakarta. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan kurikulum muatan lokal di SDN Sokowaten, Kebijakan Penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dan penentuan jumlah pembayaran SPP, kebijakan pengangkatan tenaga wiyata bhakti, pengembangan pembagian tugas guru dalam belajar mengajar, dan kebijakan pengadaan dan perawatan sarana prasarana di SDN Sokowaten.

---

<sup>46</sup> Sunartono, *Penerapan Demokratisasi Pendidikan (Studi Kasus di SDN Sokowaten Baru Yogyakarta)*, Skripsi (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

10. Skripsi yang berjudul "*Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi Pendidikan dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam*".<sup>47</sup> Berangkat dari isu tentang demokrasi yang semakin mengemuka di era reformasi saat ini, akan tetapi pendidika khususnya pendidikan Islam mengalami kemunduran. Kesimpulan atau pokok bahasan yang didapatkan penulis ada dua yaitu pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan dan implikasi terhadap pendidikan Islam.

Penelitian yang ditulis oleh saudara Muntadhiro, Syaifullah, Ali Sahlan dan Sukma Umbara TF, merupakan penelitian tentang demokrasi pendidikan yang masuk dalam ranah pendidikan Islam. Dalam penelitian ini masih ada kekurangan dalam ranah pembahasan pendidikan demokrasi dan demokrasi pendidikan. Keduanya disatukan dalam satu wadah yaitu demokrasi. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Sunartono pembahasan fokus dalam penerapan demokrasi dalam sekolah yaitu SD Sokowaten Baru Yogyakarta.

Dari buku dan skripsi di atas, penulis meyakini bahwa *Demokrasi Pendidikan Dalam Kerangka Pendidikan Nasional Telaah Pemikiran H.A.R Tilaar* masih belum nampak sebagai bahasan muka, hanya ada beberapa yang menggunakan demokrasi pendidikan akan tetapi dengan tokoh lain dan itupun lebih cenderung dalam dunia pendidikan Islam bukan pada pendidikan umum nasional Indonesia.

---

<sup>47</sup> Sukma Umbara Tirta Firdaus, *Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi Pendidikan dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam, Skripsi* (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

## F. Landasan Teoritik

### 1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demokratia* yang merupakan gabungan dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau undang-undang. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan atau undang-undang yang berakar pada rakyat atau dalam term politik kekuasaan tertinggi berada pada rakyat.<sup>48</sup> Demokrasi pada awalnya digunakan oleh pencetusnya (*Herodot*) untuk menyebut sistem pemerintahan tertentu yang dibangun berdasarkan asas rakyat sebagai sumber kekuasaan.<sup>49</sup> Demokrasi dalam kamus ilmiah adalah pemerintahan atas asas kerakyatan; pemerintahan rakyat.<sup>50</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.<sup>51</sup> Menurut Abd. Rachman Assegaf, M.A sebagaimana dikutip oleh Haryanto Al-Fandi inti demokrasi adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>52</sup> Dari masing-masing pengertian di atas, demokrasi berarti menuntut kesetaraan antara hak dan kewajiban manusia, adil, memanusiakan manusia, serta suara rakyat merupakan suara Negara.

---

<sup>48</sup> Syamsul Arifin, Ahmad Barizi, *Paradigma....*, hal. 84.

<sup>49</sup> Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran....*, hal 38.

<sup>50</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer (Edisi Lengkap)*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal. 81.

<sup>51</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 242.

<sup>52</sup> Haryanto Al-Fandi, *Desain....*, hal. 11.

Berbicara tentang demokrasi secara konvensional seakan hanya dibatasi oleh sistem politik, dan itu yang sering menjadi paradigma awal kebanyakan orang. Menurut Abd. Assegaf demokrasi lebih dari sekedar politik akan tetapi demokrasi meliputi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan bahkan agama.<sup>53</sup> Demokrasi yang ada di Indonesia bukan semata-mata mengadopsi dunia liberal barat yang memang menjunjung tinggi nilai kebebasan, akan tetapi banyak yang mendominasi seperti marxisme, al-Qur'an dan nilai tradisional Indonesia sendiri.<sup>54</sup> Dari banyak paham ini demokrasi yang ada di Indonesia kemudian diramu dalam sebuah falsafah bangsa yaitu Pancasila. Demokrasi Indonesia bukan merupakan adopsi demokrasi barat, akan tetapi demokrasi yang mengenal musyawarah, gotong royong, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Demokrasi secara kaca mata politik mempunyai korelasi positif dengan *polisentrisme*, dan menentang keras adanya *monosentrisme* atau suatu paham yang mempunyai kecenderungan serba satu dalam pusat kegiatan, sehingga melahirkan *resimentasi* yang totaliter.<sup>55</sup> Dalam demokrasi, ada nilai fundamental yang dijunjung tinggi sebagai identitas yaitu *egalitarianism* atau kesetaraan,<sup>56</sup> yang memegang nilai kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerja sama, persaingan dan kepercayaan.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan; Tipologi kondisi, Kasus dan Konsep*, (Yogyakarta: Tirta Wacana, 2004), hal. 41.

<sup>54</sup> Haryanto Al-Fandi, *Desain....*, hal. 12.

<sup>55</sup> Syamsul Arifin, Ahmad Barizi, *Paradigma .....*, hal. 85.

<sup>56</sup> Bagus Mustakim, *Pendidikan Karakter*, hal.78.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal.77.



Dalam kaitannya tentang demokrasi dan pendidikan, John Dewey memandang pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, lebih dari sebuah persiapan untuk hidup.<sup>58</sup> Sebagai “*Way Of Life*” tidak dapat mungkin tercapai tanpa adanya pendidikan, sedangkan proses pendidikan itu sendiri haruslah merupakan proses yang demokratis,<sup>59</sup> pendidika yang menghargai segala perbedaan orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaa.

## 2. Pendidikan

Berbicara mengenai pendidikan Indonesia, H.A.R Tilaar menyatakan bahwa masyarakat Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi, reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya, termasuk didalamnya pendidikan.<sup>60</sup>

Pendidikan merupakan kata yang banyak sekali pengertiannya, hal tersebut sebagai bukti bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat muatan yang tidak kosong, akan tetapi diyakin bahwa pendidikan merupakan alat yang sangat manjur digunakan untuk membangun atau malah merobohkan bangsa. Selain itu pendidikan selalu menarik diperbincangkan sehingga banyak tokoh pendidikan yang mendefinisikan sesuai dengan dasar pemikirannya. John Dewey

---

<sup>58</sup> George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, Mahmud Arif. Terjemahan, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hal. 156.

<sup>59</sup> H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 181.

<sup>60</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hal, 1-2.

berpendapat bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Kemudian J.J. Rousseau; Pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Ki Hajar Dewantara; Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>61</sup> Dalam pengertian ini sangat beragam, akan tetapi dapat di tarik benang merah bahwa pendidikan didalamnya mempunyai beberapa komponen penting yaitu pendidik, peserta didik dan juga bahan untuk pendidikan itu sendiri.

Pendidikan (*pedagogi*) secara umum bermakna sebagai upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai nilai yang ada pada masyarakat dan kebudayaan<sup>62</sup>. Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana di kutip dalam buku pendidikan multikultural, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, dan tubuh anak.<sup>63</sup> Haryanto Al-Fandi memberi kesimpulan dari banyak pengertian bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha untuk membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual dan keberagaman sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-

---

<sup>61</sup> Hasbullah, *Dasar.....*, hal. 4.

<sup>62</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan.....*, hal. 32.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 33.

citakan, yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>64</sup>

Itulah sebagian kecil pengertian pendidikan dari para ahli. Dalam undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 secara jelas dinyatakan bahwa;

*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.*<sup>65</sup>

Dalam pengertian ini, jelas bahwa pendidikan merupakan pengembangan peserta didik secara aktif untuk dikembangkan potensi yang dibawa sejak lahir agar berguna bagi dirinya, masyarakat dan juga negara. Dalam pengertian di atas jelas bahwa makna pendidikan bukan untuk di buat persaingan antar pelajar, yang persaingan itu menyebabkan ketidak jujuran peserta didik itu sendiri. Disini yang ditekankan adalah sikap terbuka antara guru dan juga murid untuk sama-sama aktif demi mewujudkan potensi yang ada pada dirinya sampai akhirnya berguna bagi negara. Sebagai penekanan, di dalam pengertian diatas tidak ada istilah ideologi kompetisi dalam pendidikan seperti yang disuarakan oleh Neoliberalisme dalam pendidikan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran....*, hal. 100.

<sup>65</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2012). hal. 2.

<sup>66</sup> M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Resist Book, Cet.1, 2011), hal. 70.

Dari banyak pengertian diatas, tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>67</sup> Kemudian menurut undang-undang SISDIKNAS yang di maksud dari manusia seutuhnya adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>68</sup> Warga Negara yang demokratis merupakan tujuan dari Negara ini, sedangkan masyarakat yang demokratis itu sendiri sangatlah mustahil jika dalam kesehariannya (sekolah dan lingkungan) tidak mencerminkan suasana yang demokratis.

### 3. Demokrasi Pendidikan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai demokrasi pendidikan, penulis menganggap penting untuk mengetahui sekilas tentang ideologi pendidikan di mana terdapat arus besar yang saling mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Ideologi besar itu adalah: Konservatisme, Liberalisme, dan Kritisisme.

*Pertama*, Konservatif adalah aliran yang berangkat dari aliran filsafat perenialisme dan esensialisme. Konsep-konsep dasar tentang pendidikan cenderung statis (eksklusif), dan cenderung mempertahankan

---

<sup>67</sup> Hasbullah, *Dasar...*, hal. 11.

<sup>68</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia..., hal. 40.

nilai-nilai normatif yang telah mapan (status quo). Pendidikan tidak lebih hanyalah transfer nilai untuk kemudian dijadikan pedoman hidup.<sup>69</sup>

*Kedua*, Liberal berangkat dari filsafat rasionalisme Rene Deskrates yang membawa pintu pencerahan (*aufklarung*) saat itu. Filsafat rasionalis ini membawa pengakuan kembali atas kebebasan, dan pengakuan atas manusia (*humanisasi*). Dalam masa ini ada tiga aspek yang menjadi jargon utama yaitu: Individualisme, Rasionalisme dan Empirisme yang ketiganya merupakan ciri utama era modern pasca pencerahan.<sup>70</sup>

*Ketiga*, Kritis yaitu paradigma yang digagas oleh tokoh Paulo Freire. Pendidikan Kritis (*critical pedadogy*) adalah mazhab pendidikan yang meyakini adanya muatan politik dalam semua aktifitas pendidikan. Visi dari pendidikan kritis dilandaskan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, kultural, dan politik yang lebih luas. Aliran ini dalam diskursus pendidikan disebut juga dengan aliran kiri, karena orientasi politiknya berlawanan dengan mazhab liberal dan konservatif.<sup>71</sup>

Demokrasi merupakan gabungan dua kata yaitu *demos* dan *kratos* yang dalam term politik yaitu kekuasaan berada pada rakyat, yang memihak rakyat dan bukan semata-mata hanya kekuasaan. Selanjutnya demokrasi pendidikan secara bahasa berarti sistem pendidikan yang berada pada rakyat atau kebutuhan rakyat. Demokrasi pendidikan merupakan

---

<sup>69</sup> Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, (Yogyakarta:Pinus Book Publisher, 2008), hal. 67.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal 72.

<sup>71</sup> M. Agus Nuryatno, *Mazhab....*, hal.1.

suatu sistem pendidikan yang menolak adanya masalah-masalah pendidikan seperti domestifikasi, pembodohan, pendidikan elitis dan lain sebagainya yang sifatnya merugikan bagi siswa atau peserta didik. Kebijakan pendidikan yang tidak memihak pada peserta didik seperti halnya Ujian Nasional penulis anggap sebagai pembodohan karena tidak tepat sasaran serta tujuannya, yang terjadi adalah menghalalkan segala cara demi sebuah kelulusan sekolah yang tidak jarang menyeret guru dan siswa untuk berbohong pada oknum-oknum tertentu.

Dari pengertian secara bahasa di atas, Demokrasi pendidikan menurut H.A.R. Tilaar adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,<sup>72</sup> yang secara umum mempunyai fungsi politik dan kebudayaan. Dalam fungsi politik, pendidikan nasional tentunya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang sehat pada setiap sikap dan cara berfikir anak. Sedangkan secara kebudayaan adalah untuk menumbuhkan rasa bangga atas kepemilikan suatu budaya nasional sebagai identitas bangsa.<sup>73</sup> Nasionalisme ini seakan hilang jika disandingkan dengan Indonesia sekarang, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah bangsa sudah mulai tidak dihiraukan. Padahal ketika dilihat pelajaran sejarah bangsa sangat membantu sekali bagi peserta didik untuk lebih menjiwai bangsanya sendiri, tanpa harus ikut dengan bangsa lain.

---

<sup>72</sup> H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan.....*, hal. 7.

<sup>73</sup> H.A.R. Tilaar, *Manajemen.....*, hal. 203.

Demokrasi Pendidikan berbeda dengan pendidikan demokrasi, Perbedaan disini terkait dengan penggunaan kedua kata tersebut. Yang pertama atau demokrasi pendidikan lebih menekankan pada sistem pendidikan yang ada, akan tetapi pada pengertian yang kedua (pendidikan demokrasi) mempunyai arti pembebasan peserta didik dalam praksis proses pendidikan didalam kelas.

Demokrasi pendidikan mempunyai empat prinsip yang harus dipegang, yaitu:

- a. Pengakuan atas hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan.
- b. Suatu sistem pendidikan yang terbuka
- c. Pendidikan untuk seluruh rakyat
- d. Tujuan pendidikan adalah manusia yang cerdas dan bermoral.<sup>74</sup>

Sedangkan pendidikan demokrasi memiliki tiga unsur pokok yang harus ada didalamnya yaitu:

- a. Pendidikan yang membebaskan

Yang dimaksud dengan pendidikan yang membebaskan dapat berupa bebas dari kebodohan. Kebodohan dapat berupa bebas dari fanatisme keterikatan terhadap nilai-nilai kelompok atau agama, akan tetapi sikap toleransi terhadap perbedaan tanpa mengurangi kadar keyakinan dalam agama sendiri.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> H.A.R. Tilaar, *Kalaedoskop....*, hal. 1110.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal, 1117.

Dengan kata lain dalam bahasa istilah orang Jawa “*Ngono yo ngono, neng ojo ngono*”.<sup>76</sup>

Selain bebas dari kebodohan, adakalanya peran pendidikan itu membebaskan dari segala kemiskinan. Kemiskinan dalam masyarakat sulit dikembangkan menjadi masyarakat yang demokratis, karena adanya beberapa hasil dari kemiskinan itu sendiri, contoh: iri hati, kemalasan, dan macam-macam sikap negatif lainnya. Lebih jauh Abdul Munir Mulkan mengemukakan bahwa demokratisasi juga dapat berarti sebagai pembebasan pendidikan dan manusia yang terlibat didalamnya dari struktur dan system serta perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen. Bahkan demokratisasi juga dapat berarti pembebasan manusia dari ketergantungan atas realitas obyektif yang sering menghambat manusia dalam mengembangkan diri untuk mencapai kualitas hidup diluar parameter material.<sup>77</sup>

b. Pendidikan yang mencerdaskan bangsa

Manusia yang sempit cara pandangnya, horizon dalam berfikir, tidak toleran merupakan gambaran manusia yang tidak cerdas. Manusia yang cerdas adalah manusia yang menghargai

---

<sup>76</sup> Terjemahan *harfiah*: begitu ya begitu, namun jangan yang begitu. Nilai ini menggambarkan bahwa dalam konflik hendak melakukan pemilahan secara seksama, mana yang mungkin untuk dilakukan mana yang tidak elok untuk dilakukan. Nilai ini juga mengandung unsur untuk memoderasi konflik, sehingga pilihan berkonflik jangan sampai membuat kedua belah pihak yang berkonflik dalam posisi diametral, hitam putih. Surwandono, “Rumah Maya Surwandono”, <http://surwandono.staff.umy.ac.id>, 11 Agustus 2011.

<sup>77</sup> Syamsul Arifin, Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan....*, hal. 97.



pendapat orang lain dapat menimbang pendapat orang lain untuk mencari yang terbaik.<sup>78</sup>

- c. Pendidikan yang bermoral demokratis, artinya mewujudkan nilai-nilai demokratis secara substansial dan prosedural.<sup>79</sup>

Sudah dinyatakan diatas, bahwa manusia yang cerdas adalah manusia yang dapat menimbang baik atau buruk untuk mencari yang terbaik (moral). Moral yang dimaksud disini adalah moral yang berdasarkan Pancasila.<sup>80</sup> Dalam pendidikan, sudah seharusnya merupakan pengembangan, pemahaman dan juga pelaksanaan dari kelima sila dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, masyarakat serta dalam aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. kelima sila tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pluralis Indonesia.

#### 4. Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional secara bahasa dapat diartikan sebagai pendidikan yang ruang lingkupnya adalah nasional atau Indonesia, sedangkan menurut Undang-undang pendidikan nasional diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap (*survive*) terhadap tuntutan perubahan zaman.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> H.A.R. Tilaar, *Kalaedoskop*...., hal. 1118.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal.1117.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 1118.

<sup>81</sup> UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003, Bab I Pasal I Ayat 2.

Pendidikan nasional dalam hal ini dituntut untuk selalu *survive* dalam perubahan zaman dengan segala kreatifitas yang ada akan tetapi disisi lain haruslah bertumpu pada dasarnya yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber kajiannya bahan pustaka untuk memperoleh gambaran suatu masalah yang diteliti atau menjadi objek kajiannya,<sup>82</sup> atau dalam sumber lain mengatakan studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan juga mencatat serta mengolah data penelitian.<sup>83</sup>

### 2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data. Sumber data penelitian studi literatur diperoleh melalui jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, abstrak, buku, surat kabar dan internet.<sup>84</sup>

- a. Teknik *dokumenter* penulis gunakan untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip termasuk juga

---

<sup>82</sup> Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa Untuk Penelitian , Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hal. 273-274.

<sup>83</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3.

<sup>84</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 3.

buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>85</sup>

- b. Teknik *wawancara* (Interview) juga penulis gunakan dengan maksud sebagai penunjang pendapat-pendapat yang selama ini belum terungkap. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan tokoh bersangkutan yaitu Henry Alexis Rudolf Tilaar. Wawancara sendiri adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>86</sup>

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan dua klasifikasi data yaitu:

- a. Data primer

Data primer merupakan karangan H.A.R. Tilaar yang digunakan penulis, yaitu:

- 1) *Kalaedoskop Pendidikan Nasional* (PT. Kompas Media Nusantara, 2012)
- 2) *Membenahi Pendidikan Nasional* (Rineka Cipta, Cet.2,2009)
- 3) *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Rineka Cipta, 2006)

---

<sup>85</sup> Nurul Zuhiah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 191.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 179.

- 4) *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Pustaka Pelajar, Cet.2, 2009)
- 5) *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Rineka Cipta, 2010)

b. Data sekunder

Adalah data penunjang yang didapat dari orang-orang terdekat yang menulis H.A.R. Tilaar atau buku terkait yang membahas topik yang sama. Yaitu:

- 1) *10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed Pendidikan Nasional Arah Kemana?* (Jakarta: Kompas, 2012)
  - 2) *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis* (Haryanto Al-Fandi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
  - 3) *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan* (M. Agus Nuryatno, Yogyakarta, Resist Book, 2011)
  - 4) *Pendidikan tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, kasus dan Konsep* (Abdurrahman Assegaf, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2004)
  - 5) *Pendidikan Untuk Orang Miskin* (Muhammad Saroni, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2013)
  - 6) *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa* (Mu'arif, Pinus Book Publisher, 2008)
- dan masih banyak buku yang dianggap relevan.

### 3. Metode analisa data

#### a. Heuristik

Menurut Riffaterre (Wellek dan Warren, 1989: 148) sebagaimana dikutip oleh Arif Bahtiar, analisis secara heuristik adalah analisis pemberian makna berdasarkan struktur bahasa secara konvensional, artinya bahasa dianalisis dalam pengertian yang sesungguhnya dari maksud bahasa,<sup>87</sup> atau dalam penelitian sejarah, heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian yang selanjutnya dibagi dalam tiga sumber yaitu sumber lisan, tulisan, dan benda (artefak).<sup>88</sup>

#### b. Kritik

Kritik dibagi dalam dua macam yaitu kritik intern dan ekstern, Kosim sebagaimana dikutip oleh Heri Jauhari mengatakan kritik ektern menguji utuh atau tidaknya data yang ada secara fisik, sedangkan kritik intern adalah menguji kesahihan sumber data, baik yang tertulis maupun lisan dengan mengadakan pendekatan kepada yang memberikan sumber informasi mengenai kebenaran keterangan yang akurat dan terperinci mengenai hal-hal yang sedang diteliti.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Arif Bahtiar, *Heuristik dan Hermeneutik dalam Apresiasi Prosa*, <http://bahasakarakterbangsa.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, di unduh: 10 Juli 2013.

<sup>88</sup> Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal.47.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 47.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah suatu proses penelaahan, penganalisisan, dan juga penafsiran terhadap data-data yang diteliti.<sup>90</sup> Interpretasi ini dimaksudkan semua data yang ada berusaha dipahami makna yang terkandung didalamnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

*Bab pertama*, berupa sistematika penulisan ilmiah yaitu: Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

*Bab kedua*, membahas biografi H.A.R. Tilaar, Mencakup beberapa aspek yang dipandang penting seperti riwayat hidup, latar belakang pendidikan, peranan dalam pendidikan nasional, karya-karya, dan mengenai pemikirannya tentang Demokrasi Pendidikan.

*Bab ketiga*, merupakan bagian yang menjelaskan secara utuh pemikiran H.A.R. Tilaar tentang demokrasi pendidikan dalam kerangka pendidikan nasional yang didalamnya mengupas masalah, pembenahan, prinsip-prinsip dasarnya, serta relevansi dalam dunia pendidikan Islam.

*Bab keempat*, bagian ini membahas tentang kesimpulan dari isi yang ada kemudian mengenai analisa kritis terhadap sistem yang ada pada pendidikan nasional, dilengkapi saran-saran dan berahir penutup.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*,

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai mana permasalahan yang penulis utarakan diawal pada bab I bahwasannya pendidikan Indonesia sudah saatnya me-*reposisi* dan juga me-*reaktualisasi* pendidikan nasional, mengingat pendidikan merupakan komponen terpenting pembangunan bangsa kedepan. Dari permasalahan yang ada penulis menyimpulkan bahwa:

1. Demokrasi pendidikan dalam pandangan H.A.R. Tilaar adalah pendidikan yang menempatkan rakyat sebagai poros kebijakannya, pendidikan ada pada kekuasaan rakyat, Yang pada prakteknya mengakui bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, pendidikan terbuka, mandiri dan kreatif, hilangnya proses stupidifikasi, dan hilangnya budaya korporasi atau *corporate culture*.
2. H.A.R. Tilaar dalam demokrasi pendidikan mempunyai 4 (empat) prinsip yang harus direalisasikan yaitu: (1) Pendidikan merupakan hak dari setiap warga Negara. (2) pendidikan yang terbuka. (3) Pendidikan untuk seluruh rakyat. (4) Tujuan pendidikan adalah untuk masyarakat cerdas dan bermoral.
3. Demokrasi pendidikan H.A.R. Tilaar mempunyai relevansi dengan prinsip demokrasi pendidikan dalam dunia Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr. Selanjutnya pendidikan Islam

kaitannya dengan demokrasi pendidikan sebagaimana hadis nabi bahwa setiap muslim wajib hukumnya menuntut Ilmu sebagai sarana untuk menjalankan hidup di dunia maupun di akhirat.

## B. Saran

1. Kepada pemangku kebijakan khususnya tentang pendidikan diharapkan mampu memberikan tempat seluas-luasnya bagi para peserta didik, mengingat Negara Indonesia belumlah dikatan Negara maju yang salah satunya adalah dilihat dari segi perekonomian masyarakat. Jika pendidikan sendiri menjauh dari masyarakat Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi maka yang akan terjadi adalah pembodohan secara terstruktur oleh pemangku kebijakan.

Kebijakan yang memarginalkan kaum miskin sudah saatnya difikir ulang dan diadakan penbacaan, secara garis besar harus dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang yaitu pendidikan mencerdaskan rakyat dan pendidikan untuk seluruh warga Negara Indonesia.

Selanjutnya masalah yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan, tujuan politik yang kian menjadi dominan dalam ujian nasional harus segera diakhiri dengan alasan pendidikan bukanlah mainan belaka yang bisa dipertainkan sesuka sendiri atau golongan akan tetapi pendidikan merupakan instrument terpenting untuk pembangunan bangsa.

2. Kepada praktisi pendidikan diharapkan mampu menggandeng segala kebijakan tentang pendidikan baik itu dengan cara langsung maupun dengan cara yang tidak langsung, untuk bersama-sama ikut menyesuaikan



dengan amanat undang-undang 1945 serta tidak menghilangkan tujuan pendidikan nasional secara umum baik politik maupun kebudayaan.

3. Kepada para pendidik diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan, karena mengingat komitmen awal undang-undang adalah pendidikan sebagai wahana untuk membentuk masyarakat yang demokratis. masyarakat demokratis mustahil akan muncul jika dalam dunia pendidikan tidak mencerminkan suasana yang demokratis.

Selanjutnya para pendidikan diharapkan tidak diam ketika melihat ketidakadilan dalam kebijakan. Mengingat peserta didik nantinya akan menjadi baik atau buruk akan ditentukan salah satunya oleh pendidik itu sendiri, kemudian luapan ahir yang terkena imbasnya adalah para pendidik.

4. Kepada para tokoh pendidikan baik itu lingkupnya pendidikan nasional maupun pendidikan islam haruslah tetap mempunyai rasa optimis yang tinggi, karena bangsa ini semakin lama akan semakin membutuhkan para tokoh pendidikan yang mempunyai rasa optimis itu untuk bersama-sama membangun pendidikan Indonesia.
5. Para tokoh pendidikan Islam harus mampu mengarungi dunia global beserta pemikiran pembaharuannya, dalam rangka mengaktualisasikan manusia sebagai *khalifah fil ard* dan juga manusia sebagai *'abd*.

### C. Penutup

Skripsi ini tentunya menjadi sangat berharga bagi penulis ketika banyak masukan yang sifatnya *konstruktif* baik dalam hal isi maupun yang

lainnya. Penulis sangat sadar sekali apa yang dituangkan dalam beberapa halaman ini sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi keyakinan penulis adalah apapun yang menjadi niat baik saat ini akan menjadi sangat bermanfaat dikemudian hari baik itu penulis sendiri maupun yang membaca. Kepada Allah SWT penulis mohon ampun.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Abd A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003
- Abd Rachman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan; Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, Yogyakarta: Tirta Wacana, 2004
- Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa Untuk Penelitian, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Diadit Media, 2011
- Agus Wibowo. "Ke mana Arah Pendidikan Kita?" *Media Indonesia*, Senin, 7 Juni 2013
- Ahmad Baedowi, "Rumah Guru Indonesia", *Media Indonesia*, Senin 29 April 2013
- Ahmad Baedowi, "The Power Of Learning Experience", *Media Indonesia*, Senin, 8 April 2013
- Ahmad Muhaimin Azzet. *Pendidikan Yang Membebaskan*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011
- Ahmad Syaifullah, *Pemikiran John Dewey Tentang Demokrasi Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ali Sahlan, *"Demokrasi Dalam Perspektif Islam :Telaah Kritis Terhadap Sistem Pendidikan Islam*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Alwan Arianto, *Pendidikan Multikultural Menurut Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed. dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Bagus Mustakim, *Pendidikan Karakter: Membangun Delapan Karakter Emas Menuju Indonesia Bermartabat*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011

- Benny Susetyo, "Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Kebijakan Gagal?", *Media Indonesia*, Jumat, 22 Maret 2013
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Conny R Samiawan, "Alex Tilaar, kawan Seperjuangan", dalam buku *10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar M.Sc, Ed, "Pendidikan Nasional: Arah Kemana?"*, Jakarta: PT. Kompas, 2012
- David Krisna Alka, Pancasila, "Gagasan Kebudayaan dan Kewarasan", *Media Indonesia*, Kamis, 24 Oktober 2013
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Termemahannya, Special for Women*, Bandung: Sygma, 2009
- Dyah Herlinawati, *Konsep Pendidikan Multikultural H.A.R. Tilaar Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- George R. Knight, *Filsafat Pendidikan* (Mahmud Arif. Terjemahan). Yogyakarta: Gama Media. 2007
- Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Prophetic Intelligence Kecerdasan Kenabian ; Menumbuhkan Potensi Hakikat Insani Melalui Pengembangan Kesehatan Ruhani*, Yogyakarta: Islamika, 2005
- Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Hujair AH Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003
- H.A.R. Tilaar, *Kalaedoskop Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas, 2012

- \_\_\_\_\_, *Kekuasaan dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pendidikan Nasional; Kajian Pendidikan Masa Depan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.10, 2011
- \_\_\_\_\_, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Standarisasi Pendidikan Nasional,: Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- H. A. R. Tilaar, dkk. *Pedagogik Kritis; Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan pendidikan; Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- H.M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap, Surabaya: Gita Media Press, 2006
- Kresnha Aditya, "Pemain Inti Dunia Pendidikan", *Media Indonesia*, Senin 8 April 2013
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Mohammad Abduhzein, "Ujian Nasional, Sudahilah!", *Media Indonesia*, Rabu, 8 Mei 2013
- MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. (Jakarta: Sekretarian Jendral MPR RI)
- Muhammad Saroni, *Pendidikan Untuk Orang Miskin*, Yogyakarta: Arruz Media, 2013

- Mukodi, *Pendidikan Islam Terpadu: reformulasi Pendidikan Islam di Era Global*, Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010
- Muntadhiro, *Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam di Pesantren*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Mu'arif. *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008
- M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik Dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Resist Book, 2011
- Moh. Yamin, *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, Yogyakarta: Diva Press, 2012
- Moh. Haitami Salim & Syamsul Arifin, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012
- Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*. (Salman Harun. Terjemahan). Bandung: Alma'arif, 1993
- Nur Ahid, *Pendidikan keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Presma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah pikiran seputar filsafat, ekonomi, social dan budaya*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004
- Said Agil Husain Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Sunartono, *Penerapan Demokratisasi Pendidikan: Studi Kasus di SDN Sokowaten Baru Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

- Suryanto & Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000
- Sutjipto. *10 windu Prof.Dr. H.A.R. Tilaar, Pendidikan Arah Kemana?*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012
- Sukma Umbara TF, *Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi Pendidikan dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012
- Syamsul Arifin, Ahmad Barizi. *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis Dan Demokrasi*, Malang: UMM Universitas Muhammadiyah Malang, 2001
- Syeh Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, (Haidar Bagir. Terjemah) Bandung: Mizan, 1984
- Tholhatul Choir & Ahwan Fanani, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Toeti Prahasthitama, "Komitmen Moral", *Media Indonesia*, Jum'at, 29 November 2013
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Bandung: Citra Umbara, 2010
- Wijaya Kusumah, "Saatnya Guru Bersuara Lantang", *Media Indonesia*, Senin 29 April 2013
- William F. O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000

#### B. Internet

- Admin, *Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. : UU Dikti Singkirkan Masyarakat Miskin*, <http://progresivenews.com/2013/05/30/prof-dr-h-a-r-tilaar-m-sc-ed-uu-dikti-singkirkan-masyarakat-miskin/>. Di unduh: Rabu, 17 Juli 2013 Pukul: 09:29
- Admin ISPI, *Prof. Dr. H. A. R. Tilaar M.Sc. Ed, Pendidik Tiada Tanding*, <http://www.ispi.or.id/2010/05/27/prof-dr-h-a-r-tilaar-msc-ed->

[pendidik-tiada-tanding/](#). Di unduh: Jum'at, 5 Juli 2013 Pukul: 11.00.

Arif Bahtiar, *Heuristik dan Hermeneutik dalam Apresiasi Prosa*, <http://bahasakarakterbangsa.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, di unduh: 10 Juli 2013.

Birgitta Ajeng DP, *Prof. H.A.R. Tilaar: Menjadi Turis?*, Error! Hyperlink reference not valid.. Di unduh, 17 Juli 2013, pukul 09.52

Email: [Alextilaar32@gmail.com](mailto:Alextilaar32@gmail.com)

Hamdillah, *Biografi Prof. Dr. H.A.R. Tilaar M.Sc, Ed* Error! Hyperlink reference not valid., Kamis, 04 Juli 2013, pukul:18.23.

Inggar Saputra, *Pengamat: UN Matikan Kreativitas Siswa*, Error! Hyperlink reference not valid., diunduh 17 Juli 2013, pukul, 10.05

<http://progresivenews.com/2013/05/30/prof-dr-h-a-r-tilaar-m-sc-ed-uu-dikti-singkirkan-masyarakat-miskin/>

Surwandono, "Rumah Maya Surwandono", <http://surwandono.staff.umsu.ac.id/2011/08/11/relevansi-nilai-ngono-yo-ngono-ning-ojo-ngono-sebagai-nilai-resolusi-konflik/> . 11 Agustus 2011



Tanggapi - lasynlmpnk x

https://mail.google.com/mail/#inbox/14365d32b9fb8aee

Google

Gmail 1 dari 12

TULIS

Kotak Masuk

Berbintang

Penting

Pesan Terkirim

Draf

Lingkaran

Selengkapnya

Telusuri, ngobrol, atau

Hutchie Philova

Michael Senduk

abdurachman as

alextilaar32

antim\_bg

Atm Paramani

FB Sales Team

Hutchie Philova

legend\_kaos

rahma chooy

Tanggapi

Kotak Masuk x

HAR Tilaar

ke saya

11.32 (21 menit yang lalu)

Pertama saya ucapkan selamat atas kerjakeras anda menyelesaikan skripsi ini. Saya mohon maaf kekeliruan saya kirim ke alamat yg salah Sabtu yl. Tanggapan saya:

1. Konsep saya ttg demokrasi pendidikan dlm ulasan anda cukup baik dan memadai.
2. BAB II bgn A da B sebaiknya pindah ke Lampiran utk menghindari seolah adanya pemujaan pribadi yg diharamkan dlm tulisan ilmiah.
3. Dlm BAB III ditambahkan pentingnya pendidikan multikultural dlm masyarakat Indonesia yg pluralistik. Dlm kaitan ini ditambahkan dlm bgn C kaitannya dgn Piagam Madinah. Piagam itu sendiri dapat dilampirkan.
4. Koreksi cetak: Pancasila dgn huruf P besar.
5. Pada akhir ulasan sebaiknya anda tambahkan kritik anda atas konsep prof. Tilaar, apa kekurangannya dan apa jalan keluarnya.

Demikianlah tanggapan saya dengan doa semoga Allah SWA meridhoi anda melanjutkan studi S3 utk mengembangkan pendidik-an kritis demi kejayaan bangsa Indonesia. MERDEKA !

Salam dan, prof. Tilaar.

Klik di sini untuk [Balas](#) atau [Teruskan](#)

**Perebutan Juara Dunia**  
Dukung Jagoan-mu di Piala Dunia Brasil bareng Listerine Join Disini  
[www.listerineindonesia.com](http://www.listerineindonesia.com)

Klik di sini untuk [Balas](#) atau [Teruskan](#)

**Jadwal Ahli K3 Umum 2014**  
pulang bawa Tablet  
Harga Tetap  
[www.facesafetytraining.com](http://www.facesafetytraining.com)

**Bikin Toko Online Instan**  
Fitur tercanggih & lengkap 60rb/bln  
Daftar hari ini bonus domain .com !  
[jejualan.com/toko-online](http://jejualan.com/toko-online)

**Bisnis Menguntungkan?**  
Memutuskan Untuk Memulai  
Investasi? Simak Tips & Trik Gratis  
dari Kami!  
[www.futuready.com/Investasi](http://www.futuready.com/Investasi)

**Lowongan Admin Terbaru**  
Cari info lowongan kerja admin?  
Buruan Apply lamaran kamu  
sekarang!  
[id.jobssdb.com](http://id.jobssdb.com)

0,01 GB (0%) dari kuota 15 GB telah digunakan

©2014 Google - [Persyaratan & Privasi](#)

Aktivitas akun terakhir: 32 menit yang lalu

11:54 AM  
06-Jan-14

## CURRICULUM VITAE

**NAMA LENGKAP** : Muklasin  
**TEMPAT/TANGGAL LAHIR** : Rejosari, 02 Februari 1991  
**ALAMAT** : Rejosari, Ulu Belu, Tanggamus, Lampung  
**TELP/HP.** : 085293003392  
**PENDIDIKAN** :

### 1. Formal

**SD/MI** : SDN 2 Rejosari, Lampung Tahun 1997 s.d. 2003  
**SMP/MTs:** MTs. Al-Ma'ruf Lampung Tahun 2003 s.d. 2006  
**SMU/MA** : MA Al-Ma'ruf Lampung Tahun 2006 s.d. 2009  
**S1** : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2009 s.d. sekarang

### 2. Non Formal

a. PON-PES A.P.I. Bahrul 'Ulum Tahun 2003 s.d. 2009  
b. PON-PES A.P.I. Luqmaniyyah Tahun 2009 s.d. 2010

### PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	OSIS MA. Al-Ma'ruf	Dev. Ekonomi	2007-2008
2.	Pon-Pes Bahrul'Ulum	Pengurus	2008-2009
3.	Rayon PMII FITK UIN Sunan Kalijaga	Pengurus	2012-2013
4.	UKM KORDISKA	Ket. Umum	2013-2014

Yogyakarta, 02 Februari 2014